

ANALISIS TINGKAT PERTUMBUHAN DAN DISPARITAS ANTAR DAERAH PADA ERA OTONOMI DAERAH

Adrian Sutawijaya

Universitas Terbuka

adrian@ut.ac.id

ABSTRAK

Semenjak bergulirnya gelombang reformasi, otonomi daerah menjadi salah satu topik sentral yang banyak dibicarakan. Otonomi Daerah menjadi wacana dan bahan kajian dari berbagai kalangan, baik pemerintah, lembaga perwakilan rakyat, kalangan akademisi, pelaku ekonomi bahkan masyarakat awam. Akan tetapi kebijakan otonomi daerah ini setelah 12 tahun di implemantasikan, sasaran untuk menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan antar daerah belum dapat berjalan sesuai dengan harapan dari otonomi itu sendiri. Artikel ini bertujuan untuk memberikan kontribusi ide untuk menurunkan tingkat disparitas antar daerah dan menganalisis pertumbuhan ekonomi antar daerah pada era otonomi daerah. Berdasarkan analisis tipologi klassen di pulau Sumatera Kabupaten/Kota yang termasuk dalam kegori cepat maju dan cepat tumbuh kecenderungan berada di Kota Propinsi dan sebagian di Kabupaten/Kota. Dengan menggunakan indeks Williamson menunjukkan kecenderungan ketimpangan yang menurun.

Keyword : Disparitas , Pertumbuhan Ekonomi , Otonomi Daerah

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1992). Sedangkan pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai

kenaikan GDP/GNP tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Namun demikian, pada umumnya para ekonom memberikan pengertian sama untuk kedua istilah tersebut. Mereka mengartikan pertumbuhan atau pembangunan ekonomi sebagai kenaikan GDP/GNP saja. Sedangkan tujuan utama yang ingin dicapai dari pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, harus pula menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan, dan tingkat pengangguran. Tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antarpenduduk, antardaerah dan antarsektor.

Namun dalam perjalanannya pembangunan ekonomi baik dalam konteks negara maupun daerah kerap kali terjadi tidak merata dan secara spasial menimbulkan ketimpangan antardaerah. Adanya ketimpangan antardaerah menunjukkan terjadinya perbedaan tingkat pembangunan tingkat kesejahteraan. Ketimpangan antardaerah sering kali menjadi permasalahan serius. Beberapa daerah mencapai pertumbuhan cepat, sementara beberapa daerah lain mengalami pertumbuhan yang lambat.

Ketimpangan antar daerah di Indonesia, selain warisan historis, juga karena kebijaksanaan pembangunan selama ini lebih menekankan kepada pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan antar golongan masyarakat serta belum signifikan dalam memfokuskan pemerataan pembangunan antar wilayah. Ketimpangan ini diperkuat pula oleh perbedaan karakteristik wilayah, kuantitas dan kualitas sumber daya manusia serta kelengkapan infrastrukturnya. Hasil studi Kuncoro (2004) menyimpulkan adanya perbedaan dalam laju pertumbuhan antara daerah dapat disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya: kecenderungan peranan modal (investor) memilih daerah perkotaan atau daerah yang memiliki fasilitas yang lengkap seperti: prasarana perhubungan, jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, perbankan, asuransi, juga tenaga kerja yang trampil; disamping itu adanya ketimpangan redistribusi pembagian pendapatan dari Pemerintah Pusat kepada daerah.

Ketimpangan pembangunan antarwilayah dapat dilihat dari perbedaan tingkat kesejahteraan (PDRB) dan pertumbuhan ekonomi antarwilayah. Data BPS tahun 2004 mengenai penguasaan PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto) seluruh provinsi dan lajur pertumbuhan PDRB antarprovinsi menunjukkan bahwa Provinsi di Jawa dan Bali menguasai sekitar 61,0 persen dari seluruh PDRB, sedangkan provinsi di Sumatra menguasai sekitar 22,2 persen, provinsi di Kalimantan menguasai 9,3 persen, Sulawesi menguasai 4,2 persen, dan provinsi di Nusa Tenggara, Maluku dan Papua hanya 3,3 persen. Selain itu, laju pertumbuhan PDRB provinsi di Jawa dan Bali pada tahun 2004 sebesar 10,71 persen, provinsi di Sumatra sebesar 7,78 persen, provinsi di Kalimantan 5,72 persen, provinsi di Sulawesi sebesar 11,22 persen, dan provinsi di Nusa Tenggara, Maluku dan Papua sebesar 4,34 persen. Kecenderungan persebaran penguasaan PDRB dan laju pertumbuhan yang tidak sama akan menyebabkan semakin timpangnya pembangunan antarwilayah.

Di Indonesia ketimpangan pembangunan antarwilayah yang terjadi tidak saja dapat dilihat dari perbedaan tingkat kesejahteraan dan perkembangan ekonomi antarwilayah dengan membandingkan penguasaan PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto) dan laju pertumbuhan PDRB antar pulau. Ketimpangan antarwilayah dapat terjadi di dalam propinsi tertentu antar kota/kabupaten dalam satu pulau. Hal ini disebabkan latar belakang demografi, geografis, ketersediaan infrastruktur dan budaya yang tidak sama, serta kapasitas sumber daya yang berbeda. Perbedaan tingkat pembangunan akan membawa dampak perbedaan tingkat kesejahteraan antar daerah pada akhirnya menyebabkan ketimpangan regional antar daerah semakin besar.

LANDASAN TEORI

Teori Pertumbuhan Klasik dan Neoklasik

Perkembangan teori pertumbuhan wilayah dimulai dari model dinamika wilayah yang sederhana sampai dengan model yang lebih komprehensif.

Pembahasan ini meliputi *teori export base* atau *economic base*, teori pertumbuhan wilayah Neoklasik, model ketidakseimbangan pertumbuhan wilayah.

Teori *Export Base*

Teori *export base* atau teori *economic base*, pertama kali dikembangkan oleh Douglas C. North pada tahun 1955. Menurut North, pertumbuhan wilayah jangka panjang tergantung pada kegiatan industri ekspornya (Tjahjati dan Kusbiantoro, 1997: 223). Kekuatan utama dalam pertumbuhan wilayah adalah permintaan eksternal akan barang dan jasa, yang dihasilkan dan diekspor oleh wilayah itu. Permintaan eksternal ini mempengaruhi penggunaan modal, tenaga kerja, dan teknologi untuk menghasilkan komoditas ekspor. Dengan kata lain, permintaan komoditas ekspor akan membentuk keterkaitan ekonomi, baik ke belakang (kegiatan produksi) maupun ke depan (sektor pelayanan).

Suatu wilayah memiliki sektor ekspor karena sektor itu menghasilkan keuntungan dalam memproduksi barang dan jasa, mempunyai sumberdaya yang unik untuk memproduksi barang dan jasa, mempunyai lokasi pemasaran yang unik, dan mempunyai beberapa tipe keuntungan transportasi. Dalam perkembangannya, perekonomian wilayah cenderung membentuk kegiatan pendukung yang dapat menguatkan posisi yang menguntungkan dalam sektor ekspor di wilayah itu. Penekanan teori ini ialah pentingnya keterbukaan wilayah yang dapat meningkatkan aliran modal dan teknologi yang dibutuhkan untuk kelanjutan pembangunan wilayah.

Teori *export base* mengandung daya tarik intuitif dan kesederhanaan, seperti halnya dianggap sebagai dasar teori, berdasarkan konsep beberapa sektor ekonomi lokal mengantarkan kekuatan ekonomi eksternal ke dalam wilayah untuk menstimulasikan perubahan secara cepat. Sasaran pertama dan utama teori *export base* adalah teori *economic base* lebih tepat diperuntukkan bagi wilayah-wilayah yang kecil dengan ekonomi sederhana dan untuk penelitian jangka pendek tentang pengembangan ekonomi wilayah. Dalam kasus yang lebih besar, semakin kompleks perekonomian dan semakin panjang analisis pertumbuhan wilayahnya, variabel-variabel lain dapat berperan penting seperti ekspor. Kedua, teori

economic base gagal menjelaskan bagaimana pengembangan wilayah dapat terjadi walaupun terjadi penurunan ekspor, sedangkan di lain pihak sektor nonekspor lainnya dapat tumbuh untuk mengimbangi penurunan itu.

Teori *economic base* atau *export base* menjadi dasar pemikiran bagi model analisis Location Quotient yang mengukur konsentrasi daripada sesuatu kegiatan atau industri di suatu daerah dengan jalan membandingkan peranannya dalam perekonomian daerah itu dengan peranan kegiatan/industri yang sama dalam perekonomian nasional (Kadariah, 1982:70)

Teori Pertumbuhan Wilayah Neoklasik

Teori pertumbuhan wilayah Neoklasik dikembangkan oleh banyak ahli ekonomi wilayah, terutama Borts pada tahun 1960, Siebert pada tahun 1969, dan Richardson pada tahun 1973 (Tjahjati dan Kusbiantoro, 1997: 224). Meskipun asumsi-asumsinya dikembangkan dari gagasan-gagasan ilmu ekonomi Neoklasik, pemahaman terhadap ruang dinyatakan dalam biaya-biaya yang dihubungkan dengan realokasi faktor-faktor produksi, pergerakan barang-barang dan penyampaian informasi.

Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi wilayah sangat berhubungan dengan tiga faktor penting, yaitu tenaga kerja, ketersediaan modal, dan kemajuan teknologi. Tingkat dan pertumbuhan faktor-faktor itu akan menentukan tingkat pendapatan dan pertumbuhan ekonomi wilayah. Sepertinya teori ini memberikan penjelasan dasar mengenai kesenjangan pendapatan (*output*) diantara wilayah-wilayah baik yang memiliki tenaga kerja, modal, dan teknologi ataupun tidak.

Hal yang penting dari teori ini adalah penekanannya pada perpindahan faktor-faktor (khususnya modal dan tenaga kerja) antarwilayah. Tenaga kerja dan modal di dalam suatu negara lebih mudah berpindah dibandingkan antarnegara, dan hal ini dapat memberikan dampak yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah. Hal ini berarti teori Neoklasik juga mengasumsikan adanya fleksibilitas faktor harga yang sempurna sehingga perpindahan tenaga kerja dan modal antarwilayah secara otomatis akan menghilangkan perbedaan-perbedaan faktor harga di antara wilayah-wilayah. Pada akhirnya, hal ini akan menyeragamkan

pendapatan per kapita wilayah. (Konsep pengumpulan wilayah yang dikembangkan dengan teori ini menjadi masukan studi empirik Williamson yang diturunkan dari Kuznets dan menghasilkan model pembangunan teori ekonomi wilayah) (Tjahjati dan Kusbiantoro, 1997: 225).

Asumsi dasar teori ini, yaitu informasi yang baik mengenai faktor harga dan fleksibilitas faktor harga yang sempurna, sangat meragukan, dengan hasil proses penyesuaian otonomi dalam model Neoklasik tidak bekerja secara penuh. Lebih jauh, teori ini tidak memberikan penekanan yang cukup terhadap pentingnya faktor permintaan, sehingga suatu wilayah dengan pertumbuhan permintaan yang tinggi terhadap barang-barang produksinya akan menjadi lokasi yang baik untuk investasi dan akan menarik lebih banyak modal dan tenaga kerja dari wilayah lainnya.

Teori Ketidakseimbangan Pertumbuhan Wilayah

Teori ketidakseimbangan pertumbuhan wilayah muncul terutama sebagai reaksi terhadap konsep kestabilan dan keseimbangan pertumbuhan dari teori Neoklasik. Tesis utama dari teori ini adalah bahwa kekuatan pasar sendiri tidak dapat menghilangkan perbedaan-perbedaan antarwilayah dalam suatu negara; bahkan sebaliknya kekuatan-kekuatan ini cenderung akan menciptakan dan bahkan memperburuk perbedaan-perbedaan itu. (Tjahjati dan Kusbiantoro, 1997: 225-226).

Dalam kritiknya terhadap teori keseimbangan pertumbuhan, Myrdal berpendapat bahwa perubahan-perubahan dalam suatu sistem sosial tidak diikuti oleh penggantian perubahan-perubahan pada arah yang berlawanan (Tjahjati dan Kusbiantoro, 1997: 226). Beranjak dari pendapat ini, ia mengembangkan teori penyebab kumulatif dan berputarnya proses sosial untuk menjelaskan ketimpangan internasional dan antarwilayah.

Menurut Myrdal, terdapat dua kekuatan yang bekerja dalam proses pertumbuhan ekonomi, efek balik negatif (*backwash effect*) dan efek penyebaran (*spread effect*) (Tjahjati dan Kusbiantoro, 1997: 226). Kedua kekuatan itu digunakan untuk menunjukkan konsekuensi spasial dari pertumbuhan ekonomi

terpusat baik negatif maupun positif. Kekuatan efek penyebaran mencakup penyebaran pasar hasil produksi bagi wilayah belum berkembang, penyebaran inovasi dan teknologi; sedangkan kekuatan efek balik negatif biasanya melampaui efek penyebaran dengan ketidakseimbangan aliran modal dan tenaga kerja dari wilayah tidak berkembang ke wilayah berkembang. Jadi, interaksi antarwilayah pada sistem pasar bebas cenderung memperburuk kinerja ekonomi wilayah yang belum berkembang. Kondisi ini memberikan pengesahan terhadap intervensi mekanisme pasar untuk mengatasi efek balik negatif yang akan menimbulkan kesenjangan wilayah.

Teori ketidakseimbangan pertumbuhan wilayah lebih jauh dikembangkan oleh Kaldor pada tahun 1970 dan berdasarkan pandangan Kaldor teori ini diperjelas oleh Dixon dan Thirwall pada tahun 1975 (Tjahjati dan Kusbiantoro, 1997: 226).

Menurut Kaldor, pertumbuhan *output* wilayah ditentukan oleh adanya peningkatan skala pengembalian, terutama dalam kegiatan manufaktur. Hal ini berarti bahwa wilayah dengan kegiatan utama sektor industri pengolahan akan mendapatkan keuntungan produktivitas yang lebih besar dibandingkan wilayah yang bergantung pada sektor primer, sehingga dapat disimpulkan bahwa wilayah dengan sektor industri akan tumbuh lebih cepat dibandingkan wilayah yang bergantung pada sektor primer.

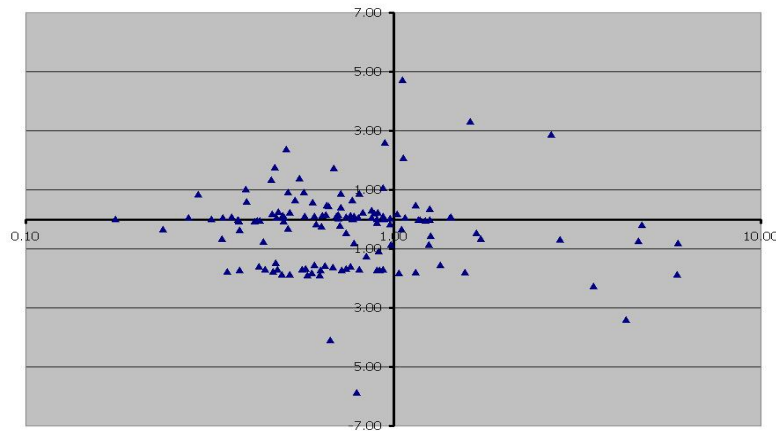
Dixon dan Thirwall mengembangkan teori Kaldor dengan menekankan dampak proses penyebab kumulatif terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah. Pertumbuhan *output* wilayah menentukan tingkat perubahan teknologi dan pertumbuhan rasio modal dan tenaga kerja. Kedua faktor ini lebih lanjut akan menentukan pertumbuhan dan tingkat produktivitas wilayah. Pertumbuhan ekspor suatu wilayah bergantung pada daya saing relatif terhadap wilayah lainnya; dengan kata lain, pertumbuhan wilayah bergantung pada produktivitas wilayah itu sendiri, dan hal ini berarti bahwa suatu peningkatan produktivitas akan mempengaruhi pertumbuhan dan tingkat ekspor suatu wilayah. Pada masalah ini, proses penyebab kumulatif pertumbuhan ekonomi akan terjadi secara menyeluruh, karena pertumbuhan ekspor wilayah menentukan pertumbuhan *output* wilayah.

Keterkaitan antara pertumbuhan *output* wilayah dan pertumbuhan produktivitas juga dikenal sebagai efek *Verdoorn* (Tjahjati dan Kusbiantoro, 1997: 227).

PEMBAHASAN

Pola Pertumbuhan Ekonomi antar wilayah di Pulau Sumatera

Pola pertumbuhan ekonomi antar wilayah di Pulau Sumatera dapat dilihat dari pola sebaran (agregat) pada masing-masing kabupaten/kota di setiap propinsi di Pulau Sumatera. Jika kita menggabungkan analisis tipologi klassen dari masing-masing propinsi, maka dapat dilihat pola sebaran pertumbuhan ekonomi antar wilayah, seperti pada gambar 1.



Gambar 1. Pola Pertumbuhan Ekonomi Antar Wilayah di Pulau Sumatera

Kuadran I

Dari 31 kota yang ada di Sumatera, hanya ada 3 kota yang masuk dalam kuadran I atau cepat-maju dan cepat tumbuh (*rapid growth*), dan dari 101 kabupaten yang ada di Pulau Sumatera terdapat 7 kabupaten yang masuk dalam kuadran I atau cepat-maju dan cepat tumbuh (*rapid growth region*). Dari ke tiga kota tersebut dua diantaranya merupakan kota yang cukup besar yaitu kota Medan dan Padang. Kedua kota tersebut merupakan kota yang selama ini menjadi pusat pertumbuhan di Pulau Sumatera. Selain itu keberadaan kota dan kabupaten ini di kuadran I ada hubungannya dengan kontribusi sektoral perekonomiannya dimana, kabupaten

dan kota peranan sektor industri pertambangan, perdagangan dan jasa cukup dominan.

Kuadran II

Terdapat 14 kota dari 31 kota dan 41 kabupaten dari 101 kabupaten tersebar di kuadran ini. Jadi totalnya terdapat 53 kota dan kabupaten dari 132 kota dan kabupaten yang ada di Pulau Sumatera masuk dalam kuadran II ini. Jumlah tersebut relative dominan, artinya sebagian besar kabupaten dan kota di Pulau Sumatera berada pada kuadran II ini. Kabupaten kota ini disebut dengan daerah berkembang cepat (*growing region*). Ini memberikan arti bahwa kota di kuadran ini mempunyai prospek tumbuh lebih baik lagi pada masa mendatang apabila proses investasi akan terus berlangsung dan iklim investasi tetap baik.

Kuadran III

Kabupaten dan kota yang terdapat di kuadran III ini relative cukup banyak yaitu 8 kota dari total 31 kota dan 41 kabupaten dari 101 kabupaten. Kabupaten dan kota yang terdapat di kuadran ini disebut dengan “Daerah maju tapi tertekan” (*Retarded region*) yaitu kota yang tingkat ekonominya lebih maju tetapi laju pertumbuhannya sedang melambat.

Kuadran IV

Terdapat 8 kota dari total 31 kota dan 12 kabupaten dari 101 kabupaten yang tersebar di kuadran IV. Kabupaten dan kota yang terdapat di kuadran ini disebut dengan “Daerah maju tapi tertekan” (*retarded region*) yaitu kota yang tingkat ekonominya lebih maju tetapi laju pertumbuhannya sedang melambat.

Analisis Ketimpangan (Disparitas) Antar Wilayah di Propinsi Sumatera

Tabel 1 Menunjukkan angka indeks ketimpangan PDRB perkapita antar propinsi di Pulau Sumatera selama periode 2000-2006 dengan menggunakan indeks Williamson yaitu rata-rata sebesar 1,11 tahun 2000 dan rata-rata sebesar 0,91 tahun 2006 ketimpangan cenderung berfluktuatif pada tahun 2000-2006. Walaupun ketimpangan berfluktuatif namun indeks rata-rata tersebut masih

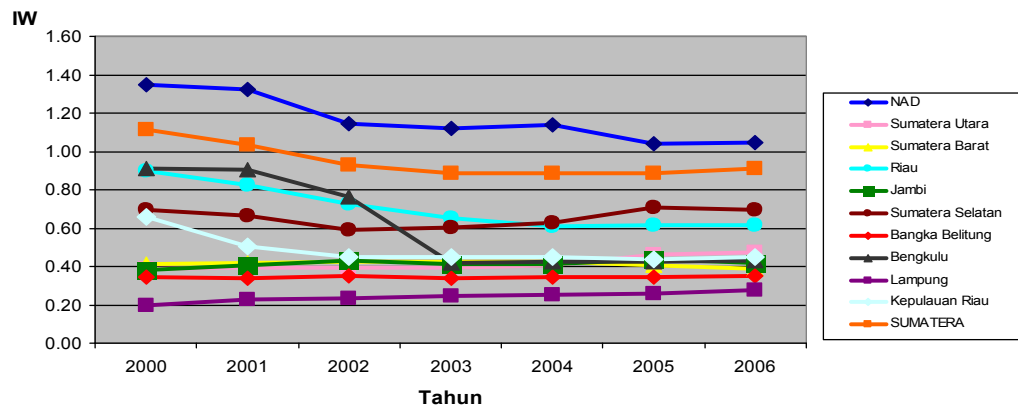
relative tinggi (kategori tinggi yakni diatas 0,50). Kondisi tersebut menunjukkan PDRB per kapita di Propinsi di Pulau Sumatera relative tidak merata.

Tabel 1. Indeks Ketimpangan (Indeks Wiliamson) 2000-2006 di Pulau Sumatera

Provinsi	Nilai Indeks Williamson						
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
NAD	1.34	1.32	1.15	1.12	1.14	1.04	1.04
Sumut	0.39	0.40	0.39	0.40	0.40	0.46	0.47
Sumbar	0.41	0.42	0.43	0.43	0.42	0.40	0.39
Riau	0.90	0.82	0.73	0.65	0.61	0.62	0.61
Jambi	0.38	0.40	0.43	0.41	0.41	0.43	0.42
Sumsel	0.70	0.67	0.59	0.60	0.63	0.71	0.70
Babel	0.34	0.34	0.35	0.34	0.35	0.34	0.35
Bengkulu	0.91	0.90	0.77	0.42	0.42	0.42	0.43
Lampung	0.20	0.23	0.23	0.25	0.25	0.26	0.28
Kep. Riau	0.66	0.51	0.45	0.45	0.45	0.44	0.45
SUMATERA	1.11	1.03	0.93	0.89	0.88	0.89	0.91

Sumber: BPS, data diolah

Ketimpangan juga terjadi di setiap propinsi pada tahun 2000-2006. Hal itu dapat dilihat hasil perhitungan dengan menggunakan Indeks Ketimpangan Wiliamson tahun 2000-2006. Tabel 1 dan Gambar 1. menunjukkan Propinsi Lampung, Babel, Jambi, Sumut, Sumbar, Kep. Riau, Bengkulu masuk ke dalam ketimpangan taraf rendah, sedangkan propinsi Sumsel, Riau dan NAD masuk ke dalam ketegori ketimpangan taraf tinggi.



Gambar 1. Indeks Ketimpangan (Williamson) per Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2000-2006

PENUTUP

- Berdasarkan analisis Tipologi Klassen di Pulau Sumatera, kabupaten/kota yang termasuk dalam kategori cepat maju dan cepat tumbuh kecenderungan berada di Kota Propinsi dan sebagian di kabupaten/kota yang memiliki sumber daya yang dimanfaatkan secara maksimal seperti, pertambangan dan perdagangan.
- Pola sebaran pertumbuhan antar wilayah di Pulau Sumatera cenderung terkonsentrasi pada kuadran II dan kuadran III. Sementara itu daerah yang memiliki pertumbuhan tinggi berada pada kuadran I dan cenderung menyebar terutama di daerah-daerah yang menjadi pusat industri.
- Ketimpangan pendapatan antardaerah tidak akan dihilangkan sama sekali karena tiap daerah mempunyai potensi sumber daya dan keadaan sarana dan prasarana (jalan, transportasi darat, pelabuhan laut maupun udara, jaringan telekomunikasi dan lain-lain) yang berbeda-beda namun begitu nilainya sebaiknya terus ditekan agar suatu daerah mempunyai ketimpangan pendapatan taraf rendah karena ketimpangan pendapatan merupakan sumber pemicu dari disintegrasi suatu daerah maupun bangsa.
- Konsentrasi kegiatan ekonomi yang tinggi di suatu daerah tertentu yang merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pendapatan antardaerah sebaiknya dikurangi seperti yang terjadi selama ini di mana konsentrasi kegiatan ekonomi di Kota Propinsi. Hal ini karena ekonomi

dari daerah dengan konsentrasi kegiatan ekonomi tinggi cenderung tumbuh pesat. Sedangkan daerah dengan tingkat konsentrasi ekonomi rendah akan cenderung mempunyai tingkat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah.

- Dengan adanya efek penyebaran (*spread effect*) seperti modal mengakibatkan adanya perubahan daerah lokasi investasi dan tenaga kerja. Hal ini harus diterima secara positif dengan didukung penyediaan dan perbaikan sarana dan prasarana yang ada, karena daerah ini akan mengalami perubahan pembangunan ekonomi secara sektoral. Keadaan ini menyebabkan masyarakat suatu daerah harus siap menghadapi transformasi struktur ekonomi agar saat proses ini terjadi masyarakat daerah ini dapat dengan cepat menyesuaikan diri dengan keadaan ini yang mungkin dapat memberikan dampak positif dan negatif.
- Perlunya menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru di daerah, meningkatkan integrasi dan interkoneksi seluruh wilayah sehingga terjadi pemerataan pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

Arsyad, Lincolin, 1992, *Ekonomi Pembangunan*, BPSTIE-YKPN, Yogyakarta

Kadariah, 1982, *Ekonomi Perencanaan*, LPFE-UI, Jakarta

Kuncoro, Mudrajat, 2004, *Otonomi Dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*, Erlangga Jakarta.

Sjafrizal, 1997, “*Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat*,” *Prisma*, No. 3, 27-38

Tumenggung, Syafrudin A., 1997, “*Paradigma Ekonomi Wilayah: Tinjauan Teori dan Praktis Ekonomi Wilayah dan Implikasi Kebijakan Pembangunan*,” dalam Tjahjati dan. Kusbiantoro (Penyunting), *Bunga Rampai: Perencanaan Pembangunan di Indonesia*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta